

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan adanya perubahan reformasi sangat memberikan dampak positif bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Adapun perubahan paradigma baru ini diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat berguna bagi para pengguna, terutama transparansi kepada masyarakat (Mahartini et al., 2020).

Terdapat empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 (PP RI Nomor 71 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyampaikan laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca keuangan daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Syarat terpenuhinya laporan keuangan sudah berkualitas salah satunya dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Menurut BPK RI, Opini WTP adalah laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam hal ini berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 8 kali berturut-turut. Opini WTP tidak menjamin tidak ada kesalahan ataupun korupsi, ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai peraturan yang ada sehingga berdampak pada pembangunan di masyarakat (Warta Bali Online, 2022).

Fakta pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang terjadi merupakan suatu hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jika dilihat di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data-data yang disajikan tidak sesuai dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti halnya di Pemerintahan Kabupaten Gianyar, pada tahun 2017 Inspektorat beserta BPK melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap 12 obyek pemeriksaan dengan 10 kategori penilaian. Kategori tersebut didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat dan dikaitkan dengan *Key Process Area (KPA) Leveling*. Dari 12 obyek pemeriksaan pada OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gianyar, Inspektorat dan BPK mendapatkan 63 temuan, yang terdiri dari temuan

administrasi sebanyak 35 temuan dan 28 temuan keuangan. Untuk temuan keuangan mencapai nilai Rp 371.575.610 (Balipost, 2018).

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sangat bermanfaat dalam berlangsungnya kegiatan pemerintahan. Untuk itu setiap OPD berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayan publik (Rismawan et al., 2020). Hal ini dibuktikan oleh Erawati & Abdulhadi (2018) dan Rismawan et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbeda dengan penelitian Riandani (2017) dan Ningrum (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD .

Laporan keuangan yang dibuat harus berkualitas, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Melalui peningkatan SDM dan didukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance* (Lilis, 2017). Hal ini dibuktikan oleh Riandani (2017) dan Rismawan et al. (2020) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap LKPD berbeda dengan penelitian

Andelina (2017) dan Aswandi (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap LKPD.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 (PP RI Nomor 60 2008) tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyebutkan SPI merupakan proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk meyakinkan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan Riandani (2017), Ningrum (2018), Rismawan et al. (2020), dan Suciyanti et al. (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap LKPD berbeda dengan penelitian Mahartini et al. (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap LKPD.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi juga dapat meningkatkan kualitas LKPD. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun internal lembaga/instansi. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu adanya sebuah sistem berbasis komputer yang mengelola data menjadi sebuah informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dibuktikan oleh Saipullah (2017), dan Mahartini et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap LKPD berbeda dengan penelitian menurut Yanti (2020)

menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap LKPD.

Peran internal audit juga berpengaruh dalam terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 (Permendagri Nomor 8 2009) inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh OPD, inspektorat melakukan review dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD memiliki keandalan informasi dan sesuai dengan SAP. Bukti empiris mengenai peran internal audit yang dilakukan oleh Suarmini et al. (2018) dan Antari et al. (2019) menemukan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap LKPD berbeda dengan penelitian (Atika et al., 2019) menyatakan bahwa peran internal audit tidak berpengaruh terhadap LKPD.

Berdasarkan uraian fakta diatas serta dengan melihat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis ingin meneliti kembali mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada OPD se-Kabupaten Gianyar dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 2) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 3) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 4) Apakah Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
- 5) Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sisitem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

- 5) Untuk mengetahui pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

- 1) Manfaat teoritis

- a) Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan gambaran luas khususnya mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit bagi Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi untuk peneliti yang lebih lanjut dibidang yang sama maupun pengembangannya pada pemerintah daerah.

- b) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.

- 2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kualitas laporan keuangan daerah agar

dapat meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

b) Bagi Masyarakat maupun *stakeholder*

Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan (*the agency theory*) khususnya menjelaskan konflik yang terjadi dalam organisasi pada saat adanya hubungan antara pihak *agent* dan *principal* yang berupa kontrak, dimana *principal* memberikan kekuasaan pada *agent* untuk membuat keputusan (Jensen and Meckling, 1976). Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada informasi yang tidak lengkap pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak dimaksudkan disini adalah kontrak antara *principal* (pemberi kerja misal pemegang saham atau pimpinan perusahaan) dengan *agent* (penerima perintah misal manajemen atau bawahan).

Menurut Lubis (2014:91), berbagai riset yang berhubungan dengan teori ini memfokuskan perhatian pada bagaimana agar sistem perjanjian kontrak kompensasi bisa mencapai keseimbangan. Alokasi kinerja perusahaan antara *principal* dan agen didasarkan pada kontrak tersebut, baik tertulis maupun tidak. Sistem kompensasi dalam kondisi yang ideal langsung dihubungkan dengan perilaku.

Masalah mendasar dalam teori keagenan adalah bagaimana caranya agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipalnya. Relevansi antara teori agensi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

adalah masyarakat sebagai *principal* memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri dan memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Hal ini disebabkan karena banyak terjadi asimetri informasi antara pemerintah yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan masyarakat. Adanya asimetri informasi inilah yang mungkin terjadinya penyelewengan kekuasaan atau korupsi oleh aparat pemerintah. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi asimetri informasi. Dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai agen wajib menyajikan laporan keuangan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan APBD sehingga dapat memberikan informasi yang akuntabel terhadap pihak prinsipal.

### 2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah suatu studi, perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer (Rismawan et al., 2020). Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransaksikan, dan memperoleh informasi secara aman. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan *hardware*, *software*, teknologi penyimpanan data, dan

teknologi komunikasi. Dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi pemerintah daerah wajib untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Selain itu, dengan adanya pembuatan situs website pemerintahan dapat memudahkan masyarakat luas untuk mengetahui informasi mengenai pemerintahan seperti kinerja, program maupun kebijakan baru yang berkaitan dengan instansi pemerintahan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 (PP RI Nomor 56 2005) tentang Sistem Informasi Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena teknologi informasi memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih cepat, efektif dan efisien.

### **2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 (Permendagri Nomor 2 2013) tentang kompetensi, kompetensi merupakan suatu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan,

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga para pegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan seorang individu atau organisasi secara efisien dan efektif. Menurut Andrianto (2017) Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat diukur dengan :

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi.

2) Pelatihan

Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang 17 menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

### 3) Pengalaman

Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

#### **2.1.4 Sistem Pengendalian Intern**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (PP RI Nomor 60 2008), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014:163)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (PP RI Nomor 60 2008) bahwa unsur sistem pengendalian intern meliputi:

##### 1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personal organisasi mengenai pengendalian.

## 2) Penilaian Resiko

Tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan perusahaan yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya pihak perusahaan mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar perusahaan.

## 3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif.

## 4) Informasi dan Komunikasi

Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah kebijakan dan prosedur atas transaksi yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Perusahaan harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yaitu informasi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta

mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5) Pemantauan

Proses penilaian kualitas kinerja diukur dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu dan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

### 2.1.5 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Hanaffi (2017) SIA merupakan Sistem Informasi yang mampu menangani dan mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Tujuan pokok dari diselenggarakannya SIA adalah terciptanya pengendalian intern yang melembaga menjadi suatu budaya manajemen yang sehat. Selain itu SIA juga bermaksud untuk:

- 1) Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan kegiatan keuangan perusahaan.
- 2) Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap seluruh aspek perusahaan.

Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan sebuah laporan atau data keuangan maupun non keuangan, yang nantinya menjadi sebuah informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak

eksternal maupun internal lembaga/instansi. Menurut Romney (2017:5) informasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri:

- 1) Relevan, yaitu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya.
- 2) Realibel, bebas kesalahan atau bias, menyajikan kejadian atau aktivitas organisasi secara akurat.
- 3) Lengkap, yaitu tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian aktivitas yang diukur.
- 4) Tepat waktu, yaitu diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambil keputusan dalam mengambil keputusan.
- 5) Dapat dipahami, yaitu disajikan dalam format yang dapat dimengerti dan jelas.
- 6) Dapat diverifikasi, yaitu dua orang yang independen dan berpengalaman di bidangnya, dan masing-masing menghasilkan informasi yang sama.
- 7) Dapat diakses, yaitu tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkannya dan dalam format yang dapat digunakan.

SIA sangat berperan penting dalam kemajuan suatu pemerintahan, hal tersebut bisa dilihat dari kualitas laporan keuangannya. Jika pemerintah menerapkan SIA dengan baik, diharapkan semua laporan dapat disajikan tepat waktu. Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai laporan keuangan semua telah

tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya (Mahartini et al., 2020).

### **2.1.5 Peran Internal Audit**

Ikatan Auditor Internal (*Institute of Internal Auditor-IIA*) mendefinisikan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 (Permendagri Nomor 23 2007) tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi:

a) Melakukan Pengawasan Administrasi Pemerintahan

Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

b) Melakukan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman

hibah luar negeri. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (PP RI Nomor 41 2007) tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten-/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Bupati/Walikota.

Secara umum proses audit terdiri dari tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Langkah yang sama juga dilakukan dalam proses audit sektor publik (Bastian, 2014:10). Berikut langkah-langkah audit pada saat proses audit dilakukan pada organisasi:

1) Perencanaan Audit

Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting bagi bukti audit yang cukup dan kompeten pendukung isi laporan audit. Proses perencanaan audit di sektor publik pada umumnya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik,
- b) Penentuan tujuan dan lingkup audit,
- c) Penilaian resiko,
- d) Penyusunan rencana audit (*audit plan*),
- e) Penyusunan program audit.

2) Pelaksanaan Audit

Sebagian besar waktu yang akan digunakan dalam pekerjaan audit sebenarnya tercurah pada perolehan atau pengumpulan dan

pengevaluasian bukti-bukti. Evaluasi sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap bukti yang terkumpul. Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Pengujian dengan prosedur analitis seperti pengujian *substantive*.
- b) Pengujian yang bersandar pada pengendalian internal pengujian *substantive*.

### 3) Pelaporan Audit

Pelaporan audit yang dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit informasi yang diperoleh dari hasil analisis hasil audit kemudian disusun menjadi laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan.

#### 2.1.6 Kualitas laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (PP RI Nomor 71 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyestakan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, penggunaan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Andelina (2017) dalam penelitiannya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu penerapan sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi SDM, 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan, serta 1 (satu) variabel moderasi yaitu komite organisasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan keuangan daerah sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderating, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andelina (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kompetensi SDM. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan sistem informasi keuangan daerah dan menggunakan teknik analisis *moderated regression analysis* (MRA).

Riandani (2017) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM, pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kompetensi SDM, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan SIA dan peran internal audit.

Saipullah (2017) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan, serta 1 (satu) variabel moderasi yaitu lingkungan eksternal. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa lingkungan eksternal mampu memoderasi kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Namun tidak mampu memoderasi penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saipullah (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan peran internal audit.

Aswandi (2018) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan pengawasan, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi sama-sama berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba dan variabel pengawasan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba di kota Padang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswandi (2018) adalah sama-sama menggunakan variabel kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi. Perbedaan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengawasan.

Erawati & Abdulhadi (2018) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi

informasi, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Abdulhadi (2018) adalah sama-sama menggunakan variabel pemanfaatan teknologi informasi. Perbedaan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit.

Ningrum (2018) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kompetensi SDM, pemanfaatn

teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit.

Suarmini et al. (2018) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan pemahaman akuntansi dan peran internal audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarmini et al. (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit.

Atika et al. (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pengaruh pemahaman akuntansi, pengalaman kerja, peran internal audit, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, tingkat pemahaman akuntansi pegawai tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kota Medan, sedangkan pengalaman kerja pegawai memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah Kota Medan, dan peran internal audit sama sekali tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kota Medan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Atika et al. (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel peran internal audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi.

Antari et al. (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Antari et al. (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel peran internal audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel

pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi.

Mahartini et al. (2020) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahartini et al. (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit.

Rismawan et al. (2020) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismawan et al. (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan system informasi akuntansi dan peran internal audit.

Suciyanti et al. (2020) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu pemanfaatan SIMDA keuangan, pemanfaatan SIMDA BMD, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan SIMDA keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan SIMDA BMD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suciyanti et al. (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan system informasi akuntansi, dan peran internal audit.

Yanti (2020) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pengawasan keuangan, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan peran internal audit.